

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 6 No. 3 Tahun 2024

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN): Pendekatan Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Penulis

Megawati Simanjuntak¹, Lilik Noor Yulianti¹, Anggi Mayang Sari,² Sofyan Sjaif,³
Ajeng Nugrahaning Dewanti⁴, Mursidah Nurfadillah,⁵ Penny Pujowati⁶

¹ Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

² Sekolah Bisnis, IPB University

³ Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

⁴ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan

⁵ Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

⁶ Program Studi Agroekoteknologi, Universitas Mulawarman

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN): Pendekatan Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak secara ekonomi maupun sosial terhadap masyarakat yang tinggal di daerah penyangga IKN
- 2) Dampak positif infrastruktur yang sudah dibangun belum banyak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah penyangga IKN
- 3) Diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN)

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), diperlukan kebijakan komprehensif dan terpadu. Prioritas utama meliputi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi umum terintegrasi, serta penyediaan air bersih melalui sumur bor dan jaringan pipa. Sistem sanitasi yang efektif dan edukasi sanitasi, serta listrik stabil dan energi terbarukan juga diperlukan. Infrastruktur telekomunikasi dan pelatihan digital harus dikembangkan. Di sektor pendidikan, perlu dibangun sekolah dengan fasilitas lengkap dan latih guru dalam teknologi pendidikan. Program pelatihan yang relevan dengan pasar kerja IKN diperlukan, bersama kerjasama industri lokal untuk magang dan pelatihan. Kesehatan masyarakat harus ditingkatkan dengan puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, dan program kesehatan masyarakat. Dorong ekonomi lokal dengan modernisasi pertanian, dukungan UMKM, dan e-commerce. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, serta bantuan sosial dan program kepemimpinan pemuda akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kata kunci: kebijakan, kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat, infrastruktur

Pendahuluan

Pandangan mengenai keterbatasan Jakarta sebagai ibu kota negara telah muncul sejak era pemerintahan Hindia Belanda dan berlanjut setelah Indonesia merdeka (Herdiana 2022). Berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong keinginan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa ibu kota baru yang terpisah dari pusat bisnis nasional di Jakarta akan mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata, sehingga Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada 18 Januari 2022, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang IKN menjadi Undang-Undang, menetapkan IKN sebagai titik fokus baru dalam penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dan pengoptimalan potensi sumber daya lokal (Kemenkeu 2022).

Sebagai kota yang akan menggantikan Jakarta, IKN memerlukan perencanaan berbasis data yang akurat dan strategis dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, termasuk desa-desa di sekitar IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten ini, yang terdiri dari empat kecamatan (Babulu, Waru, Penajam, dan Sepaku) dengan 54 desa, memiliki populasi 178.681 jiwa pada tahun 2022, dengan Kecamatan Penajam sebagai wilayah terpadat yang dihuni oleh 86.040 jiwa (BPS 2022). Populasi yang besar ini menandakan perlunya analisis mendalam tentang dampak pembangunan IKN terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya mengingat infrastruktur IKN yang sudah mulai dibangun.

Tanpa adanya penelitian mendalam mengenai kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga IKN, berbagai dampak negatif berpotensi terjadi. Ketiadaan data yang komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan program yang tidak inklusif, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan yang tidak

didasarkan pada penelitian cenderung tidak efektif dan bahkan kontraproduktif, mengakibatkan pemborosan sumber daya tanpa hasil yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat dapat memicu ketidakpuasan, konflik sosial, dan gangguan terhadap stabilitas dan keberlanjutan pembangunan IKN. Sumber daya lokal juga mungkin tidak termanfaatkan secara optimal, menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jika kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan tidak terpenuhi, kualitas hidup masyarakat di IKN dapat menurun, menciptakan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Pembangunan IKN akan membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk mengevaluasi dampak dari perubahan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesejahteraan masyarakat, program pembangunan dapat dirancang untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Hal ini termasuk memastikan optimalisasi potensi sumber daya lokal, sehingga pembangunan IKN tidak hanya membawa kemajuan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan

Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap kehidupan sosial, kerentanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga dianalisis secara mendalam melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aula Kecamatan Penajam Paser Utara pada 30 Desember 2023. FGD ini melibatkan 15 perwakilan dari delapan desa penyangga IKN, yang memberikan wawasan mengenai berbagai tantangan dan potensi yang muncul dari keberadaan IKN di wilayah mereka.

Dampak Sosial Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Hasil diskusi mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah penyangga IKN menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai nelayan atau karyawan. Namun, terbatasnya kesempatan kerja dan kecenderungan generasi muda untuk menghindari sektor perikanan, yang dianggap kurang menarik, menimbulkan masalah pengangguran di kalangan pemuda. Pemuda yang lebih terpapar teknologi dan informasi memiliki preferensi terhadap pekerjaan yang lebih modern. Seiring dimulainya pembangunan infrastruktur IKN, muncul isu terkait rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi, sementara pekerja lokal hanya direkrut untuk pekerjaan kasar. Rekrutmen ini sering kali dilakukan secara tertutup, tanpa informasi yang jelas dari dinas tenaga kerja, sehingga warga lokal harus mencari informasi pekerjaan secara informal melalui jaringan sosial.

Kehadiran pekerja pendatang menciptakan jarak sosial dengan warga setempat karena minimnya interaksi antara kedua kelompok. Pendatang juga sering kali mengabaikan protokol setempat, seperti melapor kepada RT/RW, yang mengakibatkan kurangnya ikatan sosial. Pembangunan bandara telah menghambat akses beberapa warga ke wilayah mereka tanpa adanya jalan alternatif, mengisolasi sebagian masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses warga lokal ke pihak manajemen proyek mengakibatkan kurangnya penyelesaian masalah yang efektif karena mereka hanya berhadapan dengan petugas level rendah yang tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya kasus kriminalitas di daerah penyangga, memperparah ketidaknyamanan masyarakat.

Di Kelurahan Riko, dampak sosial sangat terasa dalam bentuk gangguan aktivitas sehari-hari akibat kebisingan proyek dan peningkatan angka kriminalitas. Sementara itu, di Desa Sotek, populasi buaya yang terusik oleh pembangunan menyebabkan peningkatan serangan terhadap

penduduk, serta maraknya kasus pencurian kendaraan dan ternak, yang sebelumnya jarang terjadi.

Dampak Ekonomi Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dampak ekonomi akibat masuknya tenaga kerja dari luar wilayah beragam. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran tenaga kerja ini tidak memberikan manfaat langsung; hasil tangkapan nelayan setempat misalnya, langsung dijual kepada pengepul dan diangkut ke Balikpapan. Namun, beberapa daerah seperti Pantai Lango dan Gresik memperoleh keuntungan dari penyewaan rumah bagi pekerja yang terlibat dalam proyek Jembatan Pulau Balang. Secara umum, dampak ekonomi positif lebih dirasakan oleh warga di area ring 1 yang paling dekat dengan pusat pembangunan, seperti Desa Riko, Maridan, Lawe-Lawe, dan Sotek.

Di Kelurahan Riko, pemerintah setempat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan seperti menjahit dan laundry untuk para pemuda, serta memberikan bantuan alat untuk usaha kecil menengah (UMKM) dalam bentuk peralatan sablon dan printing. Hal ini berdampak pada perkembangan ekonomi desa, terlihat dari peningkatan usaha baru dan kenaikan nilai tanah, yang mendorong sebagian warga untuk menjual tanah mereka dengan harga tinggi.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan IKN membawa dampak ganda terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga, terutama di area ring 1 yang paling dekat dengan pusat proyek. Di sisi positif, masyarakat menerima manfaat dalam bentuk pelatihan keterampilan, dukungan untuk UMKM, serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di Sotek, RSUD di Sepaku, dan rumah sakit seperti RS Hermina dan RS Mayapada. Di bidang pendidikan, Universitas Gunadarma telah berdiri di Giri Mukti, yang diresmikan langsung oleh

Presiden RI, membuka peluang pendidikan lebih tinggi bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, masyarakat menilai keberadaan IKN membawa kemajuan dalam hal pembangunan fisik. Namun, mereka menyampaikan bahwa aspek non-fisik, seperti keamanan dan akses terhadap fasilitas umum, memerlukan perhatian lebih. Tanpa adanya penelitian dan data akurat yang berkesinambungan, risiko dari dampak negatif pembangunan IKN bisa semakin membesar, memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan mengancam kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah penyangga. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah berbasis data guna memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar IKN, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi, yang memprioritaskan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Langkah awal yang penting adalah memperbaiki infrastruktur dasar. Pembangunan jalan penghubung antara desa-desa dengan pusat IKN dan kota-kota di sekitarnya akan memperluas aksesibilitas, memfasilitasi mobilitas masyarakat, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Sistem transportasi umum terintegrasi, seperti bus dan angkutan desa, perlu dikembangkan untuk menyediakan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di wilayah penyangga.

Penyediaan air bersih harus menjadi prioritas utama, melalui pembangunan infrastruktur sumur bor dan jaringan pipa yang menjangkau seluruh desa. Pengembangan sistem sanitasi yang efektif, termasuk toilet umum bersih

dan fasilitas pengelolaan limbah terpadu, perlu didukung dengan edukasi sanitasi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, akan mendukung pasokan energi yang stabil dan ramah lingkungan. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi juga sangat penting untuk menyediakan akses internet cepat dan terjangkau, bersama dengan program pelatihan digital yang akan meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat.

Di sektor pendidikan, pembangunan sekolah dasar, menengah, dan kejuruan dengan fasilitas lengkap seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman akan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses terhadap pengetahuan. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan teknologi pendidikan dan metode pembelajaran aktif akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan modern. Program pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di IKN harus tersedia, termasuk kerjasama dengan industri lokal untuk menyediakan peluang magang dan pelatihan kerja yang relevan, sehingga lulusan siap memasuki dunia kerja.

Di bidang kesehatan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas memadai dan tenaga medis terlatih harus diprioritaskan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata. Selain itu, layanan kesehatan bergerak perlu disediakan untuk menjangkau desa-desa terpencil, mencakup pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan. Program kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat harus ditingkatkan melalui kampanye kesehatan dan edukasi masyarakat.

Untuk mendorong ekonomi lokal, modernisasi pertanian melalui teknologi seperti irigasi tetes dan penggunaan pupuk organik akan meningkatkan produktivitas pertanian yang ramah lingkungan. Budidaya perikanan berkelanjutan juga perlu diterapkan untuk mendukung keberlanjutan

sumber daya. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses keuangan, pelatihan manajemen bisnis, serta pengembangan pasar lokal dan platform e-commerce akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, serta pembentukan koperasi dan kelompok tani, akan memperkuat kemandirian ekonomi dan daya saing masyarakat desa.

Dengan pendekatan kebijakan yang holistik dan inklusif ini, kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat meningkat secara signifikan, menciptakan komunitas yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Herdiana D. 2022. Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*. 8(1): 1-30.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2022.

[Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.htm>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.



Telepon
+62 813 8875 4005



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680